

GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK RESMI BERGULIR

## Petugas 'Bergelut' Tuntaskan Sisa Sampah Tahun Baru

YOGYA (KR) - Momentum tahun baru yang bertepatan dengan hari Minggu membuat petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya harus bergelut atau bekerja ekstra dalam menuntaskan persampahan. Hal ini karena pada hari tersebut TPA Piyungan terjadwal libur sehingga pembuangan sampah baru bisa dilakukan Senin (2/1) kemarin.

Kepala DLH Kota Yogya Sugeng Darmanto, mengaku kemarin pihaknya harus mengerahkan tiga puluh unit armada yang diberangkatkan ke TPA Piyungan. "Hari ini (kemarin) kami masih harus menolkan sampah hasil tahun baru karena Minggu kan TPA Piyungan tutup," terangnya.

Menurutnya, banyak sampah yang berada di TPS maupun depo masih bercampur antara organik dan anorganik. Padahal sesuai kebijakan walikota, per Januari 2023 gerakan zero

sampah anorganik sudah resmi digulirkan. Sehingga harapannya sampah jenis anorganik sudah tuntas sejak dari produsen. Akan tetapi saat momentum tahun baru, banyak pengunjung dari berbagai daerah yang tumpah ruah di wilayah Kota Yogya. Jenis sampah yang dihasilkan pun tidak dapat langsung dipilah antara anorganik dan organik. Alhasil, petugas yang mengangkut sampah dari TPS maupun depo masih harus melakukan pemilahan.

Sugeng mengaku, kenda

gerakan zero sampah anorganik sudah bergulir namun proses sosialisasi dan edukasi masih akan terus dijalankan. Dirinya berharap ada kesadaran yang tinggi dari seluruh unsur elemen masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pembuangan sampah. "Ini kan berkaitan dengan mengubah budaya di masyarakat maupun dunia usaha. Tentunya bukan hal yang mudah dan harus terus diberikan sosialisasi secara terus-menerus," imbuhnya.

Sesuai komitmen lintas instansi, keberadaan depo juga akan dijaga oleh petugas. Hal ini untuk mengawasi agar sampah yang masuk ke depo merupakan residu atau sampah organik saja. Namun demikian tantangan yang muncul ialah keberadaan TPS di wilayah yang luput dari penjagaan. Tidak jarang masyarakat yang langsung membuang sampah ke TPS tanpa di dahului dengan pemilahan. "Tapi kita sudah minta ke wilayah agar ikut mengawasi TPS yang tidak dijaga. Harus butuh kebersamaan," tandasnya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengaku masih akan melakukan evaluasi secara berkala. Meski gerakan zero sampah anorganik sudah bergulir per Januari 2023

namun diakuinya perlu ada penyesuaian di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya masih akan melihat respons dari masyarakat setelah kebijakan tersebut dijalankan.



KR-Ardhi Wahdan  
Petugas kebersihan masih harus melakukan pemilahan sampah di salah satu TPS di Kotabaru, Senin (2/1).

"Satu atau dua bulan nanti akan kita evaluasi. Yang jelas kebijakan ini perlu kita ambil agar persoalan sampah tidak terus berulang. Memang tidak populis, namun urusan sampah menja

kebutuhan karena kita semua tidak menghendaki ada tumpukan sampah karena TPA Piyungan sudah penuh," urainya. (Dhi)-d

DISTRIBUSIKAN SPPT PBB LEBIH AWAL

## 2023, Pemkot Yogya Targetkan Rp 104 Miliar

YOGYA (KR) - Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya sepanjang tahun 2022 lalu mampu menembus 108,01 persen dari target, atau Rp 97,2 miliar dari target Rp 90 miliar. Sedangkan pada tahun ini target dinaikkan menjadi Rp 104 miliar.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan kenaikan target pendapatan PBB tahun 2023 merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini karena sektor pajak sangat diandalkan guna membiayai urusan pemerintahan serta pembangunan. "Capaian tahun lalu yang mampu melebihi target perlu kita apresiasi. Ini juga menjadi tantangan karena target tahun ini dinaikkan menjadi Rp 104 miliar," jelasnya di sela penyerahan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2023, Senin (2/1).

Sejak awal dirinya sudah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mampu menyerahkan SPPT PBB lebih awal. Dengan begitu harapannya capaiannya lebih maksimal serta target yang ditetapkan mampu tercapai. Sehingga hari per



KR-Ardhi Wahdan  
Pj Walikota Yogya menyerahkan SPPT PBB 2023 ke perangkat wilayah untuk diteruskan ke tiap wajib pajak.

tama masuk kerja di tahun 2023, SPPT PBB langsung diserahkan ke aparaturnya. Harapannya perangkat kelurahan langsung mendistribusikannya ke wajib pajak.

Menurut Sumadi, PBB merupakan salah satu bukti andil masyarakat dalam terlibat langsung dalam pembangunan. Palsalnya, perolehan pajak salah satunya dari PBB akan digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan memenuhi belanja daerah. Pemkot Yogya pun berupaya untuk mampu mandiri dengan tidak hanya bergantung terhadap dana

transfer dari Pemerintah Pusat. "Kita tentu akan terus mendorong agar wajib pajak taat menunaikan kewajibannya. Di samping itu kita juga berkomitmen dalam memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam membayar pajak," katanya.

Sejumlah kegiatan untuk memudahkan pembayaran PBB juga telah disiapkan. Di antaranya kegiatan pembayaran massal di balaikota, jemput bola di wilayah, loket di kemantren, kerja sama dengan sejumlah perbankan, kantor pos dan laku pandai. Dirinya juga sudah meminta

setiap petugas untuk menggunakan cara yang inovatif.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogya Wasesa, menuturkan jumlah SPPT PBB yang diterbitkan tahun ini mencapai 96.426 lembar dengan total ketetapan Rp 131,7 miliar. Ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 95.660 lembar. "Jatuh tempo pembayaran PBB memang 30 September, namun harapan kami masyarakat yang telah menerima SPPT bisa segera membayarkan tanpa menunggu jatuh tempo," jelasnya.

Dengan penyerahan SPPT PBB yang lebih awal diharapkan mampu memberikan cukup waktu bagi masyarakat. Targetnya maksimal pada 31 Maret 2023 seluruh SPPT sudah mampu terdistribusi ke tiap wajib pajak. Sehingga ketika wajib pajak menilai ada data yang kurang sesuai, dapat langsung diajukan untuk pembeulan. Kerap ditemui, pengajuan pembeulan dilakukan mendekati jatuh tempo sehingga sisa waktunya menjadi kurang optimal. (Dhi)-d

## Temui Tokoh Hindu, Kemenag Kunjungi Pura



KR-Istimedia  
Jajaran Kantor Kemenag Kota Yogya mengunjungi Pura Padma Bhuwana Saraswati.

YOGYA (KR) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogya terus berkomitmen mengajak tokoh agama untuk menjalin sinergi dalam melayani umat. Hal tersebut tercermin dalam rangkaian Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama, Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya dan jajaran menemui tokoh agama Hindu pada Jumat (30/12) lalu. Kegiatan berlangsung di Pura Padma Bhuwana Saraswati Jalan Mawar Baciro.

Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya H Nadhif SAG MSI, menyampaikan pihaknya ingin bisa membangun sinergi bersama para tokoh agama. "Kami berharap tokoh agama bisa saling berbagi pengalaman, untuk menambah kompetensi kami dalam melayani masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menyebut Kementerian Agama dalam usianya yang ke-77, ingin terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh umat. Dalam ke-

sempatan tersebut Nadhif didampingi para kepala seksi, penyelenggara dan pelaksana. Rombongan diterima langsung Ketua Persaudaraan Hindu Darma Indonesia (PHDI) Ketut Sandiada, didampingi para pengurus PDHI dan pengurus pura serta Penyuluh Agama Hindu Ahli Madya Drs Dewa Putu Gede Raka MPdH. Ketut Sandiada menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap dengan silaturahmi bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian. "Kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa adanya kedamaian, karena orang akan takut beraktivitas jika kondisi keamanan tidak terjamin," jelasnya.

Ia pun menerangkan Pura Padma Bhuwana Saraswati dibangun sejak 2008, setelah sebelumnya terkena dampak gempa bumi. Tempat ibadah itu pun menjadi satu-satunya Pura yang ada di Kota Yogya. (Dhi)-d

## PPKM Dicabut, Warga Diimbau Tak Euforia

YOGYA (KR) - Kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat diharapkan tidak disalahartikan oleh masyarakat. Warga pun diimbau agar tidak lantas euforia dengan mengabaikan protokol kesehatan (prokes).

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH mengaku ada penafsiran yang salah dari sebagian masyarakat terkait pencabutan PPKM oleh Pemerintah Pusat. "Tadi kami mendadak ada rapat dengan sejumlah kementerian terkait kebijakan pencabutan PPKM ini. Perlu kami sampaikan bahwa pandemi belum berakhir. Jadi jangan sampai salah mengartikan dan jangan juga sampai euforia," tandasnya, Senin (2/1).

Menurutnya, pemerintah mengambil langkah untuk mencabut PPKM karena indeks kekebalan tubuh sudah tinggi atau mencapai 98,3 persen. Hal itu juga dapat dilihat setelah tidak adanya lonjakan kasus usai beberapa kali libur panjang yang diikuti dengan tingginya aktivitas masyarakat pada tahun ini. Kondisi itu jauh berbeda pada tahun 2021 silam, di mana usai libur panjang kasus Covid-19 lantas melonjak tajam.

Oleh karena itu seiring kondisi imunitas yang sudah baik, harapannya tetap diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Dengan begitu status pandemi bisa segera berubah menjadi endemi, namun hal itu tetap menunggu hasil penilaian dari WHO. "Pemerintah berharap untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ya masih menggunakan masker. Bagi yang belum vaksinasi booster juga segera. Jangan sampai euforia bahwa PPKM sudah dicabut kemudian dibebaskan," imbaunya.

Terkait vaksinasi booster di Kota Yogya, menurut Sumadi, capaiannya sudah bagus jika dibandingkan daerah lain. Booster dosis pertama sudah mencapai di atas 100 persen. (Dhi)-d

## RALAT PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sehubungan dengan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di SKH Kedaulatan Rakyat Hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022 atas nama debitur PT STAR IMPERIUM, bersama ini disampaikan perubahan atas barang jaminan milik debitur, yang semula tertulis:

Objek/lot/lelang:  
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Hotel Aston Imperium Purwokerto yang berdiri di atasnya (dilelang tidak termasuk fixture & furniture hotel) dengan bukti kepemilikan SHGB No. 410 tanggal 16-05-1994, seluas 6.675 m2an. Perseroan Terbatas STAR IMPERIUM terletak di Jl. Oversteidsman No.33, Kelurahan Bancarkembang (dahulu Purwokerto Lor), Kec. Purwokerto Utara (dahulu Purwokerto Timur), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Seharusnya :

Objek/lot/lelang :  
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Hotel Aston Imperium Purwokerto yang berdiri di atasnya (dilelang tidak termasuk fixture & furniture hotel) dengan bukti kepemilikan SHGB No. 410 tanggal 16-05-1994, seluas 6.675 m2an. Perseroan Terbatas STAR IMPERIUM terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Yogyakarta, 03 Januari 2023  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
Kantor Wilayah 17  
Remedial & Recovery

## HARI PERTAMA MASUK KERJA Pemda DIY Tak Temukan Ada ASN Bolos

YOGYA (KR) - Ketaatan terhadap aturan dan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat harus selalu menjadi prioritas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di lingkungan Pemda DIY. Karena layanan bagi masyarakat harus tetap dikedepankan.

Sebagai bentuk komitmen dari hal itu Pemda DIY tidak segan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada apabila ditemukan ada ASN yang bolos setelah libur tahun baru. Walaupun saat hari pertama masuk setelah libur tahun baru Pemda DIY tidak menemukan adanya ASN yang membolos. "Memang, saat libur tahun baru ada beberapa ASN yang mengambil cuti. Tapi kami pastikan pada hari pertama masuk setelah libur tahun baru semua ASN di lingkungan Pemda DIY tidak ada yang bolos," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Senin (2/1).

Diungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY tidak ada satu pun ASN yang tak hadir tanpa keterangan (bolos) dihari pertama kerja pada awal tahun. Jadi berdasarkan pemantauan dan presensi yang ada semua masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pihaknya menilai para ASN tidak membolos selain bertentangan dengan aturan yang ada juga karena sudah mendapat waktu istirahat yang cukup sebab momen pergantian tahun jatuh pada Minggu (1/1). Sehingga setelah merayakan malam pergantian tahun mereka masih memiliki waktu untuk istirahat. Sehingga para ASN tidak memiliki alasan untuk tidak masuk di hari Senin (2/1). Karena mereka sudah tahu konsekuensinya bahwa jika melakukan pelanggaran bisa terancam sanksi. "Saya kira selain mereka diberi kesempatan untuk mengambil cuti, momentum tahun baru kali ini bertepatan dengan hari minggu, jadi mereka bisa leluasa tidak perlu lagi penundaan masuk atau terlambat. Karena malam tahun barunya malam Minggu. Jadi saat saya lakukan pengecekan ke BKD mereka masuk seperti biasa dan tidak ada yang terlambat," katanya. (Ria)-d

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN  
Jln. KRT. Pringgodingrat No.1 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401  
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : www.pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA  
LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA  
Nomor : 12/Pdt.Eks/2022/PN Snn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 12/Pdt.Eks/2022/PN Snn serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 1 Desember 2022 No : S-2785/KNL.0905/2022 dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodingrat No. 1, Beran, Sleman 55511, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Close Bidding) atas obyek sengketa perkara perdata No : 12/Pdt.Eks/2022/PN Snn, dalam perkara antara:

PT. BPR Mlari Pundi Artha sebagai Pemohon Eksekusi  
M e l a w a n  
Ibu Suwaryani sebagai Termohon Eksekusi I  
Sdr. Sulistyanto sebagai Termohon Eksekusi II

Yaitu Berupa:  
Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 7509, surat ukur nomor 04292/2005, tanggal 30 September 2005, dengan luas 147 m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) nama Suwaryani, yang terletak di Kalurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atas, dengan batas-batas:  
- Sebelah Utara : Toko Mebel Bpk Suraji - Sebelah Selatan : Jalan  
- Sebelah Barat : Rumah milik Suwaryani - Sebelah Timur : Rumah No 14  
Bahwa bukti kepemilikan Sertifikat di kuasai oleh Pemohon Eksekusi

• Nilai Limit : Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)  
• Uang Jaminan : Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Yang akan dilaksanakan pada:  
Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Januari 2023  
Batas Akhir Penawaran : 13.30 waktu server aplikasi lelang (sesuai WIB)  
Alamat Domain : http://www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) yang diakses pada alamat domain : "http://www.lelang.go.id". Tata cara dan prosedur panduan penggunaan pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet dengan alamat domain pada angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file "jpg" png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sesuai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam suatu file.
- Jaminan penawaran Lelang :  
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).  
b. Setoran jaminan harus sudah aktif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
c. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, serta berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
- Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirimi berkali-kali.
- Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban membayar BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta Lelang tidak dapat mnenuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodingrat No.1 Beran, Sleman, Telp (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Telp. (0274) 544091.

Sleman, 3 Januari 2023  
An. Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
Panitera  
Atino Budiman, SH., MH.  
NIP. 1965 06121986 03 1002